KEBIJAKAN FISKAL DAN TABUNGAN DOMESTIK DI INDONESIA

Putri Wulandari Atur Rejeki

PKPPA I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790048, Fax (022) 7790055, e-mail: pu3_wulandari@yahoo.com

Fiscal Policy and Domestic Saving in Indonesia

With Ordinary Least Square (OLS), the main purpose of this study is to analyze impact of fiscal policy on the domestic saving in Indonesia. The data used in this study were data time series from 1975 to 2009 obtained from Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Nota Keuangan Kementerian Keuangan and World Bank. As the dependent variable in this study is domestic saving. As the independent variables in this study are fiscal policy instrument (tax and government expenditure). As the control variable is interest rate, young dependency ratio, old dependency ratio, consumption and money demand.

The result of this study shows that all of the fiscal policy instrument simultaneously significant influence on the domestic saving of Indonesia and individually the fiscal policy instrument significant influence on the domestic saving. Based on the value of elasticity and the level of significance of fiscal policy instrument, the government expenditure plays a big role in influencing the domestic saving of Indonesia.

Keywords : *domestic saving, fiscal policy instrument, tax, government expenditure, ordinary least square*

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya sasaran utama diberlakukannya setiap kebijakan di bidang ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka akan sandang, pangan maupun papanannya dengan standar minimal tertentu. Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari besarnya proporsi konsumsi terhadap pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, maka besarnya persentase pendapatan yang dikonsumsinya pun semakin kecil.

Menurunnya persentase pendapatan nasional yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraannya sedikit demi

sedikit mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang mengalami perbaikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 15,42% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan hingga mencapai 14,15%. Disamping tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pun mengalami perbaikan. Pada tahun 2008, IPM Indonesia adalah sebesar 71,17 dan tahun 2009 meningkat menjadi 71,76.

Sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat tersebut akan membentuk tabungan masyarakat (tabungan domestik swasta). Besar kecilnya tabungan masyarakat tidak hanya bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Van den Berg (2005) tingkat tabungan masyarakat dipengaruhi pula oleh rasio

ketergantungan (*dependency ratio*). Pada saat jumlah orang yang menabung lebih banyak daripada orang yang tidak menabung (usia ketergantungan), perekonomian akan mempunyai tingkat tabungan masyarakat yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila jumlah orang yang menabung lebih sedikit, perekonomian akan mempunyai tabungan swasta yang sedikit.

Tabungan yang dihimpun dari masyarakat (tabungan domestik swasta) tersebut bersama dengan tabungan yang dikumpulkan oleh pemerintah membentuk tabungan domestik. Besarnya dana yang dihimpun melalui tabungan domestik akan digunakan untuk membiayai roda pembangunan melalui investasi di Indonesia. Oleh karena investasi merupakan bagian dari pendapatan nasional, apabila investasi meningkat, maka pendapatan nasional akan meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang terus meningkat, tabungan domestik pun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *World Bank* (1980-2009), rata-rata tingkat tabungan domestik Indonesia adalah sebesar 25,07%. Setelah Indonesia keluar dari masa krisis, pada tahun 2004 persentase tabungan domestik sebesar 24,58% PDB, pada tahun 2006 meningkat menjadi 27,89% PDB dan pada tahun 2009 menurun hingga mencapai 15,28% PDB.

Pada saat terjadinya krisis, meskipun hanya mencapai 13,2% PDB pada tahun 1999, Indonesia mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membentuk tabungan domestik. Pada masa ini, total tabungan domestik Indonesia mencapai level terendah. Periode 1985-1997 dimana pada periode tersebut belum mengalami masa krisis, tabungan domestik swasta yang

dihimpun oleh Indonesia mencapai rata-rata sebesar 26,70% PDB. Pada tahun 1989 tabungan domestik swasta Indonesia mencapai 31,28% dari total PDB. Tahun 1989 merupakan masa dimana tingkat tabungan domestik swasta Indonesia mencapai level tertinggi selama kurun waktu 30 tahun semenjak tahun 1980 hingga 2009 (*World Bank*).

Telah disinggung bahwa konsumsi masyarakat Indonesia berada pada kisaran 55-74% PDB, lain halnya dengan konsumsi pemerintah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan yaitu selalu berada pada kondisi positif dan stabil, dengan segala kemampuan pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan, meskipun kebijakan tersebut menyebabkan pengeluaran pemerintah melebihi total penerimaannya.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan maupun belanja pemerintah dikenal dengan kebijakan fiskal. Apabila belanja pemerintah melebihi pendapatan yang diperolehnya maka pemerintah mengalami defisit anggaran atau dengan kata lain kebijakan yang dilakukan pemerintah bersifat ekspansif. Berlawanan dengan hal itu, apabila konsumsi pemerintah berada di bawah pendapatannya, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti itu bersifat kontraktif.

Kebijakan fiskal yang dianut pemerintah selama ini adalah kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, dimana Indonesia selalu mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran yang dialami pemerintah Indonesia pada periode 2005-2009 berada pada kisaran 0,1% - 1,3% dari total PDB (Nota Keuangan, 2011). Rata-rata defisit anggaran selama periode tersebut sebesar 0,88% per tahun. Tahun 2007 adalah masa dimana persentase defisit anggaran mencapai level tertinggi yaitu sebesar 1,3% dari total PDB. Sedangkan tahun 2008 adalah masa

dimana persentase defisit anggaran mencapai level terendah yaitu sebesar 0,1% terhadap PDB.

Naik turunnya defisit anggaran erat kaitannya dengan beberapa faktor. Kenaikan defisit anggaran ini disebabkan oleh *pertama*, naiknya harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya beban subsidi energi yang harus ditanggung oleh pemerintah, serta naiknya dana bagi hasil migas yang harus ditransfer ke daerah. *Kedua*, meningkatnya kebutuhan dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara dan dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol (BPJT). *Ketiga*, dibentuknya dana pengembangan pendidikan nasional dan *keempat*, adanya pemberian pinjaman kepada PT PLN dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan (Nota Keuangan, 2011).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan belanja pemerintah yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan belanja pemerintah terutama karena harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan suku bunga rata-rata SBI 3 bulan. Hal ini jelas akan mempengaruhi besaran belanja subsidi dan pembayaran utang. Faktor internal yang mempengaruhi belanja pemerintah tersebut salah satunya adalah perkembangan kebutuhan penyelenggaraan negara. Sebagian besar belanja pemerintah merupakan belanja mengikat atau pengeluaran yang bersifat wajib, seperti pembayaran bunga utang, subsidi, belanja pegawai dan belanja barang.

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak ini merupakan sumber utama penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Besarnya rata-rata pertumbuhan penerimaan pemerintah

dari sektor pajak (2,58%) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah (2,66%). Hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan fiskal yang dianut oleh pemerintah. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal seperti ini tidak lain adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh dua instrumen kebijakan fiskal yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap tabungan domestik di Indonesia.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Pengertian Tabungan

Telah diuraikan pada pendahuluan bahwa investasi suatu negara dibiayai oleh tabungan nasional (maupun domestik). Tabungan merupakan determinan penting bagi terciptanya persediaan modal. Menurut Samuelson (2004) yang dimaksud dengan tabungan nasional adalah bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Tabungan nasional (maupun domestik) diciptakan oleh dua pelaku, yaitu pemerintah dan sektor swasta. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.

Apabila penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah, maka akan terjadi surplus anggaran. Adanya surplus anggaran dapat digunakan untuk membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari penerimaan pajak, maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran ini dapat mengurangi tabungan nasional (maupun domestik) dan mengerutkan (*crowding out*) investasi (Mankiw, 2005).

Dari sektor swasta (*private*), tabungan ini terdiri dari tabungan perusahaan dan tabungan rumah tangga. Dengan asumsi bahwa pendapatan masyarakat hanya dialokasikan untuk konsumsi dan tabungan, maka tabungan masyarakat tidak lain dari pendapatan disposable (*disposable income*) dikurangi konsumsi.

Oleh karena tabungan domestik diciptakan oleh dua pelaku utama (pemerintah dan swasta), untuk mempengaruhi besar kecilnya tabungan dapat melalui tabungan pemerintah ataupun tabungan swasta. Melalui tabungan pemerintah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal, apakah akan surplus ataukah defisit. Sedangkan melalui tabungan masyarakat (*swasta*), seberapa banyak orang yang akan menabung tergantung pada insentif yang akan diterimanya (Mankiw, 2005).

2. Kebijakan Fiskal dan Hubungannya terhadap Tabungan

Menurut DornBusch & Fischer (2008) yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat belanja pemerintah, transfer dan struktur pajak. Samuelson (2005) berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah program pemerintah yang menyangkut pembelian barang dan jasa serta pengeluaran untuk pembayaran transfer dan juga bentuk tarif pajak yang merupakan sarana utama pemerintah dalam pengaturan ekonomi.

Sebagai salah satu perangkat dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi (*redistribusi*) serta fungsi stabilisasi ekonomi makro (Musgrave, 1984). Ketiga fungsi tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Fungsi alokasi anggaran bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dengan mengalokasikan

sumber daya yang dimiliki kepada sektor-sektor yang memberikan manfaat paling besar. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan agar pembagian pendapatan nasional kepada masyarakat lebih adil dan merata. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro bertujuan untuk menciptakan perekonomian tetap stabil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, apabila perekonomian sedang dalam keadaan inflasi atau deflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak maupun pengeluaran pemerintah agar perekonomian kembali stabil.

Terdapat enam tujuan dari kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh ML Jhingan (2008) yaitu *pertama* meningkatkan laju investasi, baik sektor swasta maupun sektor negara, *kedua* mendorong investasi optimal secara sosial. Tujuan kebijakan fiskal yang *ketiga* adalah meningkatkan kesempatan kerja, *keempat* meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, *kelima* menanggulangi inflasi dan *keenam* meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penerimaan dan pengeluaran negara yang dapat mempengaruhi perekonomian. Penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak (*taxes*) dan belanja pemerintah (*government purchases*) merupakan instrument/perangkat yang digunakan dalam kebijakan fiskal. Berikut ini akan diuraikan dua instrument dari kebijakan fiskal yaitu pajak (*taxes*) dan belanja pemerintah (*government purchases*) dan bagaimana pengaruhnya terhadap tabungan domestik swasta.

3. Pajak

Sumber utama dari penerimaan pemerintah adalah pajak yang sekaligus merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perekonomian (Sobandi, 2008). Karena peranannya yang begitu besar terhadap penerimaan kas negara, pajak dianggap sangat signifikan untuk menentukan besar kecilnya pengeluaran pemerintah.

Pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara, ML Jhingan (2008) menyatakan bahwa pajak dapat dipergunakan untuk mencapai berbagai tujuan yaitu untuk membatasi konsumsi, untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Berkenaan dengan tujuan yang kedua dari Jhingan yaitu meningkatkan dorongan untuk menabung, Giavazzi (2000) menyatakan bahwa apabila rumah tangga dalam suatu masyarakat mempunyai rencana yang terbatas (*finite planning horizon* sebagaimana dalam *an overlapping generations models*), dengan asumsi bahwa pajak masa depan sama dengan pajak saat ini, kenaikan pajak saat ini akan mengurangi pendapatan seumur hidupnya (Y) pada masa sekarang. Dengan demikian rumah tangga tersebut akan mengurangi konsumsi maupun tabungan mereka. Menurut Rosen (2005) *an overlapping generations models* menunjukkan bahwa beban hutang pemerintah saat ini akan ditransfer kepada generasi yang akan datang. Sehingga di sisi pemerintah, adanya kenaikan pajak akan meningkatkan

tabungan pemerintah dan akan menghasilkan hubungan yang positif di antara pajak dan tabungan.

Hubungan yang positif antara pajak dan tabungan ini juga dikemukakan oleh Sukirno (2005) yang menyatakan bahwa pajak yang tinggi akan menghasilkan tabungan yang tinggi apabila hasrat mengkonsumsi marjinal (MPC) pemerintah atas pajak yang dinaikkan lebih kecil dari hasrat mengkonsumsi marjinal sektor swasta atas pendapatan marjinal. Dengan demikian kenaikan pajak akan mempunyai hubungan yang positif dengan tabungan.

4. Pengeluaran Pemerintah

Samuelson (2005) menyatakan bahwa pembayaran transfer oleh pemerintah seperti tunjangan kesejahteraan untuk orang-orang miskin maupun jaminan sosial lainnya tidak termasuk dalam variabel belanja pemerintah. Hal ini dikarenakan pembayaran transfer tidak dilakukan dalam pertukaran dengan sebagian output barang dan jasa perekonomian

Pembiayaan pengeluaran pemerintah berasal dari pajak dan pungutan lainnya. Dalam melaksanakan pengeluarannya, pemerintah dapat membelanjakan dana sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Kebijakan fiskal seperti ini dikenal dengan istilah *balanced budget*. Apabila pengeluaran pemerintah kurang dari pendapatan yang diperolehnya, maka pemerintah akan mengalami surplus anggaran. Kebijakan fiskal seperti ini bersifat kontraksi. Akan tetapi seringkali pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya. Dalam hal ini pemerintah mengalami defisit anggaran, kebijakan fiskal yang terjadi bersifat ekspansif. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada saat defisit anggaran, pemerintah akan meminjam salah satunya berasal dari tabungan swasta (*private saving*).

Mankiw (2007) menjelaskan bahwa kenaikan belanja pemerintah akan berpengaruh terhadap tabungan domestik swasta. Peningkatan pada belanja pemerintah yang tidak dikaitkan dengan peningkatan pajak, maka pemerintah mendanainya dengan meminjam, yaitu dengan mengurangi tabungan masyarakat. Dengan demikian pinjaman pemerintah ini akan mengurangi tabungan domestik swasta.

Giavazzi (2000) menjelaskan bahwa pada model *finite horizon*, kenaikan pada pengeluaran pemerintah akan menyebabkan berkurangnya tabungan domestik swasta. Konsumsi pemerintah yang lebih besar selain dibiayai oleh pajak juga akan dibiayai oleh tabungan swasta dalam bentuk pinjaman. Karena baik tabungan swasta maupun tabungan pemerintah menjadi berkurang, dengan kenaikan belanja pemerintah ini menyebabkan tabungan domestik menjadi berkurang.

5. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Tabungan Domestik Swasta

Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian perilaku tabungan sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumsi rumah tangga. Berikut ini pendapat para ahli tentang teori konsumsi diantaranya *Absolute Income Hypothesis* (hipotesis pendapatan absolut) dari Keynes, Teori Pilihan Antar Waktu dari Fisher, *Life Cycle Hypothesis* dari Modigliani dan *The Permanent Income Hypothesis* dari Friedman.

Hipotesis siklus hidup juga menyoroti pentingnya struktur populasi penduduk terhadap tabungan. Apabila proporsi tertinggi dari populasi adalah penduduk usia bekerja, maka kondisi perekonomian akan memperlihatkan tingkat tabungan privat yang tinggi. Hal ini disebabkan para pekerja harus mempersiapkan diri

bila mereka pensiun. Sebaliknya, ketika para pekerja ini mencapai usia pensiun, maka kecenderungannya akan melakukan *dissaving*. Dengan demikian tingkat tabungan domestik swasta akan mengalami kemerosotan (Sukirno, 2005).

Sejalan dengan hipotesis siklus hidup, Van den Berg (2001) menyatakan bahwa populasi merupakan determinan penting terhadap tabungan nasional (maupun tabungan domestik swasta). Total tabungan pada suatu perekonomian, sudah barang tentu merupakan total dari tabungan setiap individunya. Sehingga, apabila terdapat individu yang lebih banyak menabung (penduduk usia produktif) daripada individu yang menguras tabungan (penduduk usia muda dan tua) maka perekonomian tersebut akan mempunyai tabungan yang positif. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan struktur usia berpengaruh terhadap level tabungan pada suatu perekonomian (Van den Berg, 2001).

Menurut Faruqee (2000) tingkat tabungan secara negatif dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan (*dependency ratio*). Pengertian dari tingkat ketergantungan sendiri adalah rasio jumlah penduduk yang belum produktif (berusia < 14 tahun) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (berusia > 65 tahun) terhadap total penduduk yang masih produktif (berusia 15 - 64 tahun). Penduduk yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi mengkonsumsi lebih daripada yang mereka hasilkan serta tergantung pada barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk yang berusia produktif dalam perekonomian.

Selain dua faktor di atas, permintaan uang dapat pula turut mempengaruhi besar kecilnya tabungan. Permintaan uang didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan (Sukirno, 2005). Analisis Keynes menyebutkan

bahwa terdapat tiga motif permintaan uang. *Pertama*, permintaan uang digunakan dalam transaksi. Baik konsumen, perusahaan maupun pemerintah memerlukan uang untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak barang yang akan dibeli. Dengan demikian semakin banyak pendapatan konsumen, maka semakin banyak uang yang diperlukan untuk bertransaksi. Perusahaan menyimpan uang untuk membayar gaji dan membeli bahan produksi dan pengeluaran lainnya. *Kedua* orang ingin memegang uang digunakan untuk tujuan berjaga-jaga. Untuk menghadapi keadaan yang tidak diinginkan (seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, sakit, dan lainnya) uang yang ada ditangan mereka akan disimpan dalam bentuk tabungan. Lebih banyak pendapatan yang dihasilkan, akan disimpan untuk keadaan yang tak terduga.

Ketiga permintaan uang untuk digunakan dalam spekulasi. Dalam perekonomian modern, sebagian dari kekayaan rumah tangga disimpan dalam bentuk harta-harta keuangan seperti saham, obligasi atau tabungan dalam bentuk deposito. Harta seperti ini disimpan untuk memperoleh pendapatan, yang biasanya diukur sebagai persentase dari harta keuangan tersebut. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam membuat pilihan memegang uang atau melepaskan uang untuk membeli harta keuangan tersebut. Pada saat suku bunga rendah, masyarakat akan lebih suka memegang uang daripada membeli harta-harta keuangan, demikian sebaliknya.

C. PENELITIAN-PENELITIAN SEBELUMNYA

1. Faruqee dan Husain (1998)

Terdapat empat negara yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh

Faruqee dan Husain pada tahun 1998. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian yang menggunakan data dari tahun 1970-1992 ini bertujuan untuk mengetahui pola tabungan pada jangka panjang. Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, secara empirik penelitian ini menguji determinan ekonomi yang mendasari kecenderungan untuk menabung pada negara-negara tersebut.

Model yang digunakan dalam penelitian yang berjudul *Saving Trends in Southeast Asia: A Cross-Country Analysis* ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{S}{Y} = \alpha_0 + \alpha_1 DEM + \alpha_2 \frac{M}{Y} + \alpha_3 \frac{PFS}{Y} + \alpha_4 Y_{PCAP} + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana: S/Y adalah rasio tabungan terhadap total pendapatan, DEM adalah rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap total penduduk, M/Y adalah rasio jumlah uang yang beredar terhadap total pendapatan, PFS/Y adalah rasio pendapatan *disposable* terhadap total pendapatan, Y_{PCAP} adalah pendapatan per kapita riil, a_i adalah koefisien regresi, dan ε merupakan *error term*

Dari model yang digunakan di atas, tidak semua *variable independent* berpengaruh secara signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap variabel tabungan. Di Malaysia dan Indonesia, nilai R^2 yang diperoleh adalah masing-masing sebesar 65% dan 88%. *Variable independent* yang signifikan mempengaruhi tabungan di dua negara ini hanyalah *variable DEM* dan Y_{PCAP} . DEM berpengaruh positif terhadap tabungan di setiap negara, sedangkan Y_{PCAP} berpengaruh negatif terhadap tabungan di Malaysia dan berpengaruh positif di Indonesia.

Untuk negara Singapura, dengan R^2 sebesar 96% terdapat tiga *variable independent* yang berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tabungan. Ketiga variabel tersebut adalah DEM, M/Y dan PFS/Y. Sedangkan untuk Thailand, walaupun nilai R^2 yang diperoleh sebesar 89%, akan tetapi tidak satu pun *variable independent* berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan.

2. Giavazzi, Jappelli dan Pagano (2000)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Giavazzi, Jappelli dan Pagano ingin mengetahui hubungan antara tingkat pajak dan tingkat pengeluaran pemerintah terhadap tingkat tabungan nasional. Variabel *independent* yang digunakan adalah nilai kelambanan tingkat tabungan nasional, variabel ini diharapkan dapat menjelaskan pergerakan tabungan nasional, sementara *output gap* merefleksikan respon dari tabungan swasta dan (surplus pemerintah) tabungan pemerintah pada perubahan transitori pendapatan. Variable *independent* yang lainnya yaitu tingkat suku bunga riil (selisih antara suku bunga jangka pendek (nominal) dengan inflasi, berdasarkan deflator konsumsi swasta dan tingkat ketergantungan penduduk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap tabungan nasional bersifat tidak linear. Ketidaklinieran ini mengandung makna bahwa pengaruh yang ditimbulkan pada saat kebijakan fiskal bersifat ekspansif maupun pada saat kebijakan fiskal bersifat kontraktif berbeda.

Dalam penelitiannya, Giavazzi dkk. menggunakan dua kelompok data yang berbeda, yaitu kelompok negara industri dan kelompok negara berkembang. Masing-masing kelompok data menggunakan model yang berbeda. Pada kelompok negara industri, Giavazzi menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$\frac{S_t}{Y_t^*} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{S_{t-1}}{Y_t^*} + \alpha_2 \frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} + \alpha_3 r_t + \beta_1 \frac{T_t}{Y_t^*} + \beta_2 d_1 \frac{T_t}{Y_t^*} + \gamma_1 \frac{G_t}{Y_t^*} + \gamma_2 d_1 \frac{G_t}{Y_t^*} + \varepsilon \quad (2)$$

di mana: Y_t^* adalah output potensial, $\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*}$ adalah kesenjangan output (*output gap*), S_t adalah besarnya tabungan nasional pada tahun t , S_{t-1} adalah besarnya tabungan nasional pada tahun $t-1$, r_t adalah tingkat suku bunga pada tahun t , T_t adalah besarnya pajak pada tahun t , G_t adalah besarnya pengeluaran pemerintah pada tahun t dan α_i merupakan koefisien regresi.

Dengan menggunakan teknik analisis *Ordinary Least Square* (OLS) dengan *fixed effect*, model tersebut mempunyai nilai R^2 (*goodness of fit*) sebesar 92,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 92,8% tingkat tabungan nasional dapat dijelaskan oleh variabel-variabel *independent*, sedangkan 7,2% dijelaskan oleh faktor yang lain. Kemudian koefisien nilai kelambanan dari tabungan domestik swasta berpengaruh positif ($\alpha_1 = 0,627$) dan signifikan terhadap tabungan domestik swasta, tingkat suku bunga berpengaruh positif ($\alpha_3 = 0,044$) akan tetapi tidak signifikan pada taraf kepercayaan $\alpha = 10\%$.

Dua variabel *independent* lainnya yaitu pajak dan belanja pemerintah masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan nasional. Peningkatan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan tabungan nasional, sedangkan peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tabungan domestik swasta. Pada saat terjadinya kontraksi fiskal, koefisien pajak dan belanja pemerintah masing-masing sebesar $\beta = 0,034$ dan $\gamma = -0,503$ sedangkan pada saat terjadinya ekspansi fiskal koefisien pajak dan belanja pemerintah masing-masing sebesar $\beta = 0,219$ dan $\gamma = -0,711$.

Pada kelompok negara berkembang, Giavazzi dkk tidak menggunakan suku bunga riil sebagai salah satu variable independennya, akan tetapi digantikan dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Model yang digunakan selengkapnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{S_t}{Y_t^*} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{S_{t-1}}{Y_t^*} + \alpha_2 \frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} + \alpha_3 DR_t + \beta_1 \frac{T_t}{Y_t^*} + \beta_2 d_1 \frac{T_t}{Y_t^*} + \gamma_1 \frac{G_t}{Y_t^*} + \gamma_2 d_1 \frac{G_t}{Y_t^*} + \varepsilon \quad (3)$$

Di mana: Y_t^* adalah output potensial, $\frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*}$ merupakan kesenjangan output (*output gap*), S_t adalah tabungan nasional pada tahun t , S_{t-1} adalah tabungan nasional pada tahun $t-1$, DR adalah tingkat *dependency ratio* pada tahun t , T_t adalah besarnya pajak pada tahun t , G_t merupakan besarnya pengeluaran pemerintah pada tahun t , α_i , β , γ adalah koefisien regresi, dan d_i adalah variabel dummy, $i = 1, 2$

Dengan teknik analisis yang sama diperoleh bahwa, model tersebut mempunyai nilai R^2 (*goodness of fit*) sebesar 81,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 81,8% tingkat tabungan nasional dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent, sedangkan 18,2% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nilai kelambanan dari tabungan nasional berpengaruh positif ($a_1 = 0,467$) dan signifikan terhadap tabungan nasional, *dependency ratio* berpengaruh negatif ($a_3 = 0,221$) terhadap tabungan nasional.

Dua *variable independent* lainnya yaitu pajak dan belanja pemerintah masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan domestik swasta. Peningkatan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan tabungan domestik swasta, sedangkan peningkatan belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap tabungan domestik swasta. Pada saat terjadinya kontraksi fiskal,

koefisien pajak dan belanja pemerintah masing-masing sebesar $\beta = 0,279$ dan $\gamma = -0,459$ sedangkan pada saat terjadinya ekspansi fiskal koefisien pajak dan belanja pemerintah masing-masing sebesar $\beta = 0,190$ dan $\gamma = -0,427$.

3. Dalimunthe, Daulay, Lubis dan Syarif (2006)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh keempat peneliti ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pendapatan per kapita terhadap tingkat tabungan domestik swasta. Dalam penelitiannya, Dalimunthe dkk menggunakan model sebagai berikut:

$$SAV = a_0 + a_1 GDP + a_2 R + a_3 Y_{PCAP} + a_4 G + \varepsilon(4)$$

Di mana: SAV adalah tingkat tabungan nasional, GDP adalah Produk Domestik Bruto, R adalah tingkat suku bunga, Y_{PCAP} adalah pendapatan perkapita, G adalah belanja pemerintah, a_i = koefisien regresi.

Dengan menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS) hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan pada taraf kepercayaan 1% dengan koefisien sebesar $\alpha_1 = 0,342$. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang positif terhadap total tabungan $\alpha_2 = 1410,37$ namun tidak signifikan secara statistik. Pendapatan perkapita berpengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar $\alpha_3 = 0,0014$ namun tidak signifikan secara statistik. Belanja pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan pada taraf kepercayaan 1%, dengan nilai koefisien regresi sebesar $\alpha_4 = -0,676$.

D. METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini bertujuan

untuk memberikan gambaran, mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empirik dari variabel-variabel *independent* yang mempengaruhi suatu variabel *dependent*. Metode analisis deskriptif disusun berdasarkan data sekunder, literatur, jurnal, makalah, artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan dalam melakukan metode analisis kuantitatif dilakukan melalui pemodelan ekonometrika yang diinterpretasikan melalui aspek statistik dan ekonomi mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* selama periode 1980 -2009. Kurun waktu 30 tahun cukup memadai untuk membangun suatu model ekonometri.

b. Model Ekonometrika

Model yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model yang dikembangkan oleh Giavazzi (2000) dengan beberapa penyesuaian. Variabel *dependent* yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat tabungan domestik swasta, sedangkan variabel *independent* yang digunakan adalah tingkat ketergantungan usia muda dan usia tua, konsumsi, tingkat pajak, pengeluaran pemerintah dan banyaknya uang beredar. Secara matematis model tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{S}{Y} = \alpha_1 + \alpha_2 DR_Y + \alpha_3 DR_O + \alpha_4 \frac{C}{Y} + \alpha_5 \frac{T}{Y} + \alpha_6 \frac{G}{Y} + \alpha_7 M2 + \varepsilon \tag{5}$$

dimana:

S/Y = tingkat tabungan domestik swasta (saving rate)

T/Y = tingkat pajak (tax rate)

G/Y = tingkat belanja pemerintah

C/Y = tingkat konsumsi masyarakat

DR_O = tingkat ketergantungan penduduk tua

DR_Y = tingkat ketergantungan penduduk muda

$M2$ = Rasio jumlah uang yang beredar terhadap total pendapatan

a_i = koefisien regresi

ε = *error term*

E. HASIL PENELITIAN

Hasil Estimasi

Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), data *time series* selama 30 tahun dari tahun 1980 hingga 2009 dihasilkan estimasi sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Estimasi *Ordinary Least Square* (OLS)

No.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
1.	Intercept	279.4871	72.49587	3.855214	0.0008
2.	C/Y	-0.630078	0.211078	-2.985045	0.0066
3.	DR_O	-26.75306	8.140483	-3.286421	0.0032
4.	DR_Y	-2.974971	1.033797	-2.877713	0.0085
5.	G/Y	-0.768289	0.366140	-2.098346	0.0471
6.	M2	0.015877	0.005749	2.761448	0.0111
7.	T/Y	0.575027	0.307383	1.870719	0.0742
8.	R2	0.493045			
10.	Durbin Watson	1.438777			

Sumber: Hasil Regresi dengan Metode *Ordinary Least Square* (OLS)

Adapun pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1) Konstanta

Nilai koefisien konstanta adalah sebesar 279.4871 dan nilai t-hitung 3.855214 signifikan pada α 1%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh variabel - variabel lain diluar tingkat ketergantungan penduduk muda

maupun tua, tingkat konsumsi, tingkat pajak, tingkat pengeluaran pemerintah dan permintaan uang terhadap tabungan domestik swasta.

2) Tingkat Ketergantungan Penduduk Muda

Nilai koefisien tingkat ketergantungan penduduk muda sebesar -2.974971 dengan t-hitung sebesar -2.877713. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Adanya penambahan 1 persen tingkat ketergantungan penduduk muda akan menurunkan tingkat tabungan domestik swasta sebesar 2.974971%.

3) Tingkat Ketergantungan Penduduk Tua

Koefisien variabel tingkat ketergantungan penduduk tua adalah -26.75306, hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Adanya penambahan 1 persen tingkat ketergantungan penduduk tua akan menurunkan tingkat tabungan domestik swasta sebesar 26.75306%.

4) Tingkat Konsumsi

Tingkat konsumsi mempengaruhi tingkat tabungan domestik swasta. Berdasarkan hasil regresi nilai koefisiennya sebesar -0.630078 dengan t-hitung sebesar -2.985045 signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Hal ini berarti dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat sebesar 1% akan menurunkan tingkat tabungan domestik swasta sebesar 0.630078%.

5) Tingkat pajak

Tingkat pajak meningkat maka akan meningkatkan pula tingkat tabungan domestik swasta, fenomena ini dapat dijelaskan dengan tingkat kepercayaan 10%. Kesimpulan yang diambil Ho tetap ditolak, artinya ada pengaruh secara parsial antara tingkat pajak terhadap tabungan domestik swasta di Indonesia. Jika tingkat pajak meningkat sebesar 1%

maka tingkat tabungan domestik swasta akan meningkat sebesar 0.575027%.

6) Tingkat Pengeluaran Pemerintah

Nilai koefisien tingkat pengeluaran pemerintah sebesar -0.768289 dengan t-hitung sebesar -2.098346. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Adanya penambahan 1 persen tingkat pengeluaran pemerintah akan menurunkan tingkat tabungan domestik swasta sebesar 0.768289%.

7) Jumlah permintaan uang

Jumlah permintaan uang meningkat maka akan meningkatkan pula tingkat tabungan domestik swasta, fenomena ini dapat dijelaskan dengan tingkat kepercayaan 5%. Kesimpulan yang diambil Ho tetap ditolak, artinya ada pengaruh secara parsial antara permintaan uang terhadap tingkat tabungan domestik swasta di Indonesia. Jika permintaan uang meningkat sebesar 1% maka tingkat tabungan domestik swasta akan meningkat sebesar 0.015877%.

F. Implikasi Kebijakan dan Solusi Terhadap Permasalahan

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pajak dan variabel terkait lainnya seperti tingkat ketergantungan penduduk muda maupun penduduk tua, tingkat konsumsi, dan permintaan uang bersama-sama terhadap tabungan domestik swasta. Demikian pula tingkat pengeluaran pemerintah beserta variabel terkait berpengaruh negatif terhadap tabungan domestik swasta. Hal ini menunjukkan bahwa dua instrument kebijakan fiskal yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah beserta variabel lainnya merupakan faktor penting dalam pembentukan tabungan domestik swasta. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam bidang perencanaan

pembangunan dan bidang lainnya diharapkan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1) Pajak merupakan variabel pendorong tabungan domestik swasta, dengan diberlakukannya kebijakan mengenai kenaikan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2008 misalnya akan meningkatkan tabungan domestik swasta. Besarnya persentase pajak yang dikenakan tersebut akan memacu peningkatan terhadap penerimaan pemerintah. Namun, di sisi lain pemerintah harus sadar bahwa dengan adanya kenaikan pajak tidak serta merta meningkatkan penerimaan pemerintah, malah bisa jadi akan mengakibatkan menurunnya penerimaan pemerintah. Tingkat kenaikan pajak dan jenis barang yang akan dikenai kenaikan pajak benar-benar harus diperhatikan.

2) Memperhatikan komponen pengeluaran pemerintah yang terdiri atas belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut berdasarkan hasil penelitian akan menguras tabungan domestik swasta. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya seperti yang terkandung dalam Nota Keuangan 2012 akan berdampak terhadap menurunnya tingkat tabungan domestik swasta. Berkurangnya tabungan domestik swasta tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat apabila dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bukan untuk keperluan konsumtif akan tetapi akan sangat terasa manfaatnya apabila benar-benar untuk kemaslahatan rakyat.

3) Tingkat ketergantungan penduduk muda maupun tua merupakan variabel yang penting dalam meningkatkan tabungan domestik swasta. Program Keluarga Berencana yang telah lama dilakukan tidak hanya

berimplikasi terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk. Namun juga dapat meningkatkan tabungan domestik swasta menjadi lebih tinggi.

4) Pola konsumsi masyarakat pun berkontribusi pada tingkat tabungan domestik swasta. Semakin tinggi konsumsi masyarakat akan mengakibatkan menurunnya tabungan domestik swasta. Pola konsumsi masyarakat yang dikendalikan oleh Pemerintah akan berdampak pada peningkatan tabungan domestik swasta.

5) Jumlah permintaan uang cukup signifikan terhadap peningkatan tabungan domestik swasta. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah uang beredar berimplikasi pada meningkatnya tabungan domestik swasta.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian data time series 1980-2009, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan domestik swasta. Pajak yang tinggi akan menghasilkan tabungan yang tinggi apabila hasrat mengonsumsi marjinal (MPC) pemerintah atas pajak yang dinaikkan lebih kecil dibandingkan dengan hasrat mengonsumsi marjinal sektor swasta atas pendapatan marjinal. Dengan demikian kenaikan pajak mempunyai hubungan yang positif dengan tabungan domestik swasta.
- 2) Pengeluaran pemerintah secara negatif dan signifikan mempengaruhi tabungan domestik swasta di Indonesia. Peningkatan pengeluaran pemerintah jelas akan menambah defisit anggaran pemerintah dan peningkatan pengeluaran pemerintah ini akan dibiayai oleh tabungan domestik

swasta. Dengan demikian adanya peningkatan pada pengeluaran pemerintah akan menurunkan tabungan domestik swasta.

H. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan :

- 1) Dua instrument kebijakan fiskal pajak dan pengeluaran pemerintah bersama - sama dengan variabel lain seperti tingkat suku bunga, tingkat ketergantungan penduduk muda dan tingkat ketergantungan penduduk tua, tingkat konsumsi masyarakat dan jumlah uang beredar merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat tabungan domestik swasta sehingga variabel tersebut juga turut mendapat perhatian pemerintah dalam meningkatkan tabungan domestik swasta.
- 2) Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan total belanja

pemerintah. Kepada para pembaca yang berminat untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap tabungan domestik swasta akan sangat terlihat pengaruh detailnya apabila kebijakan fiskal yang digunakan tidak hanya total dari pajak maupun belanja pemerintah, akan tetapi dapat menggunakan unit-unit terkecil dari pajak maupun belanja pemerintah.

- 3) Dari sektor pajak misalnya dengan memilah pajak perdagangan dalam negeri saja atau pajak perdagangan internasional yang berpengaruh terhadap tabungan domestik swasta.
- 4) Begitu pula dari sisi belanja pemerintah dapat digunakan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah ataupun bantuan sosial yang lebih berpengaruh terhadap tabungan domestik swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2003. *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Chiang, A.C & Wainwright, K. 2006. *Dasar-dasar Matematika Ekonomi*. Terjemahan Sudigno & Nartanto. Jakarta: Erlangga.
- Dalimunthe, A. et al. 2005. Analisis Determinan yang Mempengaruhi Tabungan di Indonesia. *Jurnal Mepa Ekonomi*.
- Dornbusch, R., Fischer, S. & Startz, R. 2008. *Makroekonomi*. Terjemahan Roy Indra Mirazudin. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Eisner, R. 1994. *National Saving and Budget Deficits*. *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 76 No. 1, 181-186.
- Faruqee, H. & Husain, A.M. 1998. *Saving Trends in Southeast Asia: A Cross-Country Analysis*. *Asian Economic Journal* Vol. 12 No. 3, 195-217.
- Goldfeld, S.M. & Chandler, L.V. 1990. *Ekonomi Uang dan Bank*. Terjemahan Danny Hutabarat. Jakarta: Erlangga.
- Giavazzi, F., Jappelli, T. & Pagano, M. 2000. *Searching for non-linear effects of fiscal policy: evidence from industrial and developing countries*. *European Economic Review* 44, 1259-1289.
- Gujarati, D.N. 2003, *Basic Econometrics*, 4th edition, New York: McGraw-hill Companies, Inc.

- Hoy, M. et al. 2000. *Mathematics for Economics 2nd Edition*. Cambridge: MIT Press.
- Insukindro. 1994. *Reformasi Perpajakan, Keseimbangan Intern dan Distribusi Pendapatan (Makalah Seminar Reformasi erpajakan II: Substansi, Urgensi dan Prospek, PAU Studi Ekonomi UGM)*.
- Insukindro, Makhfatih. A & Maryatno. 2000. *Dasar-dasar Ekonometrika: Pelatihan Ekonometrika dasar Untuk Pegawai Bank Indonesia*. Yogyakarta : Program Studi MEP, Universitas Gajah Mada.
- Insukindro, Makhfatih, A & Sugiyanto, C. 1994. Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994. Yogyakarta : Program Studi MEP, Universitas Gajah Mada.
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkoesobroto, G. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Mankiw. 2005. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Nachrowi, D. N. & Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Romer, D. 2009. *Advance Macroeconomics*. New York: Mc Graw Hill International.
- Rosen, HS. 2005. *Public Finance Seventh edition*. New York: Mc Graw Hill International.
- Sugiyanto, C. 1994. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Todaro, MP & Smith, SC. 2006. *Economic Development, Ninth Edition*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Van den Berg, H. 2001. *Economic Growth and Development*. New York: Mc Graw Hill.
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonosia (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia).